

SISTEM PERINGATAN DINI: STRATEGI PREVENTIF KONFLIK UNTUK MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DI LAHAN PANTAI

*Early Warning Systems: Strategies of Conflict Preventive to Maintain Environmental
Sustainability in Coastal Land*

Hadi Suyono

Fakultas Psikologi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55166,

Indonesia

*Email: hadi.suyono@psy.uad.ac.id

Abstrak

Konflik lingkungan terjadi di berbagai daerah karena ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pemilik modal dengan rakyat. Dampak dari konflik lingkungan menimbulkan kerusakan harta benda dan korban jiwa. Cara yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik lingkungan menggunakan *early warning system*. Cara tersebut merupakan strategi efektif karena melakukan tindakan preventif sebelum konflik berkembang menjadi manifes. Realitas tersebut menjadikan tujuan penelitian adalah menemukan sistem peringatan dini konflik untuk menjaga kelestarian lingkungan di lahan pantai. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan fonemologi menjadi pilihan desain penelitian dengan subjek berjumlah 7 merupakan tokoh penggerak perlawanan tambang pasir besi yang berpotensi merusak lingkungan di lahan pantai Kulon Progo. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan analisis isi. Hasil dari analisis isi diperoleh gambaran mengenai konflik lingkungan yang terjadi karena adanya keterancaman eksistensi sebagai petani, menjaga jarak dengan berbagai pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan, telah mengarah pada konflik terbuka, berkembang ketidakpercayaan terhadap *in group* dan *out group*, dan menguatnya modal sosial di lingkungan internal masyarakat setempat. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan pondasi untuk melakukan sistem peringatan dini konflik lingkungan. Temuan ini berperan untuk pijakan sistem peringatan dini konflik karena bermanfaat sebagai landasan pengambilan kebijakan pencegahan konflik agar tidak tumbuh kekerasan dan berujung pada situasi damai.

Kata kunci: sistem peringatan dini, konflik lingkungan

Abstract

Environmental conflicts occur in various regions because there are different interests between the government and the owners of capital and the people. The impact of environmental conflicts causes property damage and loss of life. Ways that can be done to prevent environmental conflicts are using an early warning system. This method is an effective strategy because it takes preventive action before the conflict develops into a manifest. This reality makes the aim of the research to find a conflict early warning system to preserve the environment in coastal areas. The method in this research is qualitative. The phenomenological approach became the research design choice with 7 subjects being the driving force for the resistance to iron sand mining which has the potential to damage the environment on the Kulon Progo coastal land. Data retrieval using semi-structured interview techniques. After the data was obtained, then a content analysis was carried out. The results of the content analysis obtained an overview of environmental conflicts that occur due to the threat of existence as farmers, keeping a distance from various parties that cause environmental damage, has led to open conflict, growing distrust of in-group and out-group, and strengthening social capital in the internal environment. local community. The results of this study can be used as a foundation for conducting an early warning system for environmental conflicts. This finding serves as the basis for a conflict early warning system because it is useful as a basis for making conflict prevention policies so that violence does not grow and leads to a peaceful situation.

Keyword: early warning system, environmental conflict

PENDAHULUAN

Konflik lingkungan banyak terjadi di Indonesia. Berbagai kasus konflik lingkungan tersebut sudah berlangsung lama. Terbukti pada kurun waktu sejak sepuluh tahun lalu telah hadir konflik lingkungan. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik lingkungan seperti pencemaran lingkungan, perebutan kepemilikan lahan antara korporasi dengan rakyat, penataan lahan, dan penolakan eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan ekonomi (Suyono, 2015). Seiring dengan berjalannya waktu konflik lingkungan terus berlangsung sampai sekarang. Faktor yang menyebabkan konflik tersebut masih berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat pencemaran, sengketa lahan, penolakan kegiatan pertambangan, dan eksplorasi sumber daya alam (Novita, 2018; Herdiansyah, 2019; Lesmana, dkk. 2020; Ade, dkk. 2021).

Peristiwa konflik lingkungan marak terjadi dalam kurun waktu yang panjang dan sampai sekarang belum ada tindakan penyelesaian secara tuntas. Hal ini dikarenakan melihat dari realitas upaya penanganan konflik lingkungan belum dilakukan secara efektif. Peristiwa konflik lingkungan intensitasnya masih tinggi disebabkan oleh langkah penghentiannya sebatas bersifat kuratif. Tindakan penyelesaian konflik memilih cara kuratif dapat dilihat dari implementasi setelah terjadi konflik lingkungan baru dicari strategi untuk meredam konflik tersebut. Strategi yang dilakukan adalah menemukan faktor yang menyebabkan, dinamika, dan dampak dari konflik lingkungan. Hasil dari temuan ini dijadikan dasar untuk mengatasi konflik agar tidak berkembang luas. Tindakan kuratif untuk menyelesaikan konflik bukan merupakan pilihan yang baik karena sudah terlanjur ada kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan kerugian ekonomi baru diusahakan mengatasi masalah (Suyono, 2015).

Tindakan kuratif bukan merupakan pilihan tepat juga disebabkan membutuhkan pemikiran, energi, dan kiat yang lebih banyak untuk menemukan jalan keluar terhadap problem yang menyebabkan konflik lingkungan. Resolusi konflik ini tidak mudah untuk diprogramkan karena masalah yang hadir sudah melibatkan berbagai kepentingan dari pihak birokrasi, korporasi, dan masyarakat. Ketika pihak-pihak yang berkonflik mempunyai berbagai kepentingan terhadap pemanfaatan lingkungan akan menjadi hambatan untuk menyatukan visi, misi, dan tujuan bersama untuk menyelesaikan konflik lingkungan. Pihak-pihak yang terlibat konflik ini mempertahankan kepentingan masing-masing sehingga terasa berat untuk mencari titik temu upaya damai (Munawwaroh, dkk. 2018; Ramadhan, dkk. 2016; Suyono, 2013).

Penanganan konflik lingkungan menggunakan tindakan kuratif terbukti bukan pilihan tepat karena kurang efektif dalam menyelesaikan konflik lingkungan. Sayangnya tindakan kuratif banyak diterapkan di Indonesia sehingga konflik lingkungan masih saja terjadi. Berdasarkan pertimbangan tindakan kuratif tidak efektif, maka memerlukan usaha lain untuk meminimalisir terjadinya konflik lingkungan. Cara yang bisa dilakukan dengan melakukan upaya berbeda yaitu melakukan upaya pencegahan. Upaya preventif menjadi strategi efektif untuk mengelola konflik lingkungan karena konflik yang terjadi berada pada eskalasi awal, intensitasnya masih rendah, dan belum berkembang menjadi manifes. Saat konflik

masih berada pada kondisi ini akan lebih mudah untuk menghentikan konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan. Strategi pencegahan ini tidak membutuhkan energi yang besar untuk mewujudkan perdamaian karena pihak-pihak yang berkonflik belum menanggung kerugian terlalu banyak sebagai dampak dari konflik yang terjadi (Suyono, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas menjadikan penelitian memiliki tujuan utama mengkaji sistem peringatan dini yang diterapkan pada konflik lahan pantai sehingga dapat digunakan untuk mencegah konflik sebelum mengarah pada kekerasan. Berpondasi pada tujuan tersebut maka penelitian ini untuk memahami bagaimana mengaplikasikan sistem peringatan dini konflik sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik lingkungan di lahan pantai ? Pertanyaan penelitian ini mengarahkan penelitian mengenai sistem peringatan dini konflik di kawasan lahan pantai memuat pertimbangan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini karena di latarbelakangi kenyataan yang menunjukkan kerusakan lingkungan lahan pantai diakibatkan oleh penambangan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Abd Rahman & Sumktaki, 2020). Selain menjaga kelestarian lingkungan bahwa konflik akan berdampak pada warga yang bertempat tinggal di sekitar lahan pantai. Problem ini dapat diselesaikan apabila ada tindakan pencegahan konflik lingkungan dengan sistem peringatan dini, sehingga warga dapat menikmati kesejahteraan. Caranya adalah warga dapat memanfaatkan lahan pantai dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Isabrin, 2013).

Dalam rangka menjelaskan dinamika dari pertanyaan penelitian memerlukan eksplorasi secara mendalam mengenai berbagai gejala yang menyebabkan terjadinya konflik lingkungan. Eksplorasi menghasilkan temuan komprehensif mengenai gejala konflik lingkungan dapat dijadikan landasan untuk melakukan upaya preventif. Hal ini karena memahami tentang gejala konflik lingkungan menjadi dasar untuk melakukan penanganan agar eskalasi menurun, sehingga berujung pada situasi damai (Suyono, 2018). Pencapaian dari proses tersebut dapat terlaksanakan dengan baik dengan menerapkan sistem peringatan dini konflik menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ilmiah mengenai pendekatan kualitatif untuk diterapkan pada sistem peringatan dini konflik memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kajian ilmiah yang menjelaskan tentang konflik. Selama ini yang dijelaskan lebih banyak mengkaji proses terjadinya konflik dan belum

menyentuh sistem peringatan dini konflik. Gambaran ini menjadi bukti kajian ilmiah mengenai sistem peringatan dini pada konflik lingkungan di lahan pantai belum banyak dilakukan di Indonesia (Suyono, 2015).

Sistem peringatan dini

Model sistem peringatan dini dalam bidang konflik diterapkan sejak perang dunia ke 2. Pada perang dunia ke 2 ini sistem peringatan dini digunakan untuk memprediksi terjadinya perang. Setelah perang dunia ke 2 berakhir, penerapan dari sistem peringatan dini dikembangkan untuk pencegahan kerusakan lingkungan akibat bencana seperti banjir, gempa, dan gunung berapi (Tiruneh, 2010). Berpedoman pada pengalaman sistem peringatan dini yang sudah dikerjakan sebelumnya dapat dikembangkan inovasi untuk mencegah terjadinya konflik lingkungan dengan menggunakan model *conflict early warning* dan *early respon system*. Dalam kajian ini untuk tindakan pencegahan konflik lingkungan menggunakan *early warning system* dengan melakukan pengumpulan data, analisis, dan rekomendasi (Wulf & Debiel, 2009; Malik & Muluk, 2009; Malik, 2013).

Pelaksanaan *early warning system* mengacu pada metode *type conjuctual models* merupakan jenis sistem peringatan dini konflik untuk menjelaskan kompleksitas dengan mengeksplorasi berbagai gejala yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik (Brecke, 2000). Penerapan dari *type conjuctual models* dalam sistem peringatan dini konflik lingkungan dengan menemukan variasi gejala yang menjadi embrio penyebab adanya penolakan petani terhadap eksploitasi lahan pantai yang mengakibatkan kerusakan lingkungan (Suyono, 2013).

Menentukan gejala konflik lingkungan

Berdasarkan kategori konflik dapat dijadikan pedoman untuk menentukan gejala konflik lingkungan karena faktor keterancaman, menjaga jarak, mengarah pada konflik konflik terbuka, modal sosial, dan ketidakpercayaan (Mulder, 1985, Endraswara, 2012, & Sjafri, 2011). Penjelasan mengenai keterancaman menyangkut eksistensi nilai kehidupan bagi dirinya seperti melestarikan lingkungan lahan pantai bersifat kultural dan ekonomi. Potensi konflik terjadi karena ancaman akan kehilangan basis kultural dan ekonomi pada komunitas berada di sekitar lahan pantai (Harel-Fisch, Radwan, Walsh, Laufer, Amitai, Fogel-Grinvald, & Abdeen, 2010; Schmid & Muldoon, 2015). Potensi konflik juga dapat ditandai adanya gejala menjaga jarak, yaitu adanya jarak sosial antara *in group* dalam hal ini warga yang

memanfaatkan lahan pantai untuk memperoleh penghasilan dan *out group* merupakan pihak-pihak yang berpotensi merusak lahan pantai (Boxer & Radice, 2018; Hadar-Shoval, dkk. 2019).

Perkembangan konflik semakin meningkat apabila sudah mengarah pada konflik terbuka ditandai oleh gejala eskalasi karena adanya kerusakan lingkungan menimbulkan masalah terhadap hajat hidup. Hal ini dapat menstimulasi keresahan warga. Dinamika konflik tersebut apabila tak ada penanganan yang baik untuk menghentikannya akan melahirkan konflik terbuka ditunjukkan melalui kekerasan (Sørensen & Johansen, 2016). Modal sosial merupakan bagian lain dari gejala konflik lingkungan. Gejala yang terjadi adalah keretakan modal sosial karena ada sebagai masyarakat yang menolak eksploitasi lahan pantai yang dilakukan oleh korporasi dan ada sebagian warga yang setuju kegiatan penambangan di lahan pantai (McDougall & Banjade, 2015; Chang, 2020). Ketidakpercayaan menjadi bagian penanda terjadinya konflik lingkungan. Ketidakpercayaan mulai berkembang saat ada kecurigaan bahwa *out group* yang mempunyai keinginan membantu menyelesaikan masalah merupakan pihak yang bekerjasama dengan korporasi untuk melemahkan perjuangan komunitas masyarakat setempat. Kondisi ini menjadi embrio berkembangnya konflik karena komunitas masyarakat setempat akan menggunakan caranya sendiri saat berbenturan dengan pihak lain yang dianggap memiliki kontribusi terhadap perusakan lingkungan (Celestina, 2018; Pitlik & Rode, 2020).

METODE

Metode penelitian adalah kualitatif menekankan pada sifat realitas yang berkembang secara sosial, menitikberatkan pada situasi yang membangun penyelidikan, mencari jawaban-jawaban pertanyaan berasal dari pengalaman sosial dalam rangka memperoleh makna-makna (Gerring, 2017). Metode kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengungkap kesadaran manusia secara aktif mengenai objek pengalaman. Fenomenologi juga menjelaskan struktur dasar realitas yang merupakan interpretatif memfokuskan pada perhatian makna dan pengalaman (Frauenberger, dkk. 2010). Berdasarkan pondasi ini maka pendekatan fenomenologi dipilih karena dapat digunakan untuk memperoleh jawaban dari realitas yang diperoleh melalui pengalaman sosial dan mendapatkan

makna-makna dengan cara menemukan indikator-indikator sebagai upaya tindakan preventif merupakan wujud dari sistem peringatan dini sebagai dasar kebijakan mengelola konflik tidak berkembang menjadi manifes dan berujung pada situasi damai. Hal lain yang menjadi pertimbangan pendekatan fenomenologi adalah mampu mengeksplorasi kesadaran petani mengenai pengalaman berada pada situasi menjaga kelestarian lingkungan yang ternyata menimbulkan masalah dengan korporasi yang dianggap sebagai pihak yang merusak lingkungan tersebut. Eksplorasi pengalaman diinterpretasi dengan memperhatikan makna dan pengalaman petani dalam keterlibatannya pada fenomena menjaga lingkungan tetap lestari. Makna dan pengalaman tersebut diwujudkan melalui indikator-indikator potensi konflik pada komunitas petani lahan pantai.

Responden adalah petani lahan pantai Kulon Progo yang menjadi pelopor dan tokoh melakukan gerakan penolakan terhadap eksplorasi lahan pantai Kulon Progo yang dijadikan area tambang pasir besi. Responden sebanyak 7 petani ini dijadikan subjek penelitian dengan pertimbangan memahami secara mendalam berkaitan dengan dinamika petani untuk menjaga kelestarian lingkungan di lahan pantai. Subjek merupakan warga yang bertempat tinggal di kawasan lahan pantai Kulon Progo. Subjek merupakan generasi yang memelopori teknik budidaya pertanian di lahan pantai yang mampu merubah lahan tandus menjadi subur untuk ditanami berbagai komoditas buah-buahan dan sayur-sayuran. Subjek telah menggarap lahan pantai menjadi lahan pertanian lebih dari 20 tahun. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu responden menjadi subyek penelitian sesuai dengan karakteristik subjek yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data diperoleh dari responden dengan teknik wawancara semi terstruktur. Instrumen wawancara yang dijadikan pedoman mengacu pada gejala konflik lingkungan yang terdiri dari faktor keterancaman, menjaga jarak, mengarah pada konflik konflik terbuka, modal sosial, dan ketidakpercayaan. Berdasarkan pedoman wawancara tersebut pada masing-masing faktor disusun sebanyak 6 pertanyaan sehingga berjumlah 30 pertanyaan. Bersumber dari 30 pertanyaan inti dapat dikembangkan saat wawancara dengan responden untuk mendapatkan data secara mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung pada responden selama 8 minggu.

Setelah data diperoleh dari responden dilakukan analisis secara sistematis dengan langkah-langkah, yaitu: mengolah dan mempersiapkan data, membaca data secara utuh, melakukan *coding*, menuliskan *setting*, memaparkan responden, membuat kategori, mendeskripsikan tema, menyajikan dalam bentuk narasi, dan melakukan interpretasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi yang merupakan analisis data kualitatif yang bersifat mendalam dan menginterpretasikan makna dibalik apa yang diucapkan responden (Stemler, 2000; Kallio, dkk. 2016). Adapun kredibilitas penelitian dicapai dengan melakukan strategi validasi melalui triangulasi. Penerapan dari triangulasi adalah memanfaatkan berbagai teori, sumber literature, pandangan ahli yang disesuaikan dengan tema, dan penelitian lain yang bermanfaat untuk memeriksa kebenaran dan bukti penguat agar temuan dapat dipercaya (Hussein, 2009).

HASIL DAN DISKUSI

Setelah dilakukan analisis data memperoleh hasil dan pembahasan penelitian sebagai berikut :

Keterancaman

Pada tingkat keterancaman diperoleh hasil yang ditunjukkan melalui wawancara sebagai berikut :

“Yaa, sangat terancam lah pak..karena masyarakat di sini sangat menggantungkan hidup dari lahan untuk pertanian..dan untuk menghidupi..dan kalau ada tambang ruang hidup kita menjadi hilang..meski sini baru rencana penambangan tetapi kita sudah merasa terganggu gitu. Tambang akan menjadikan alam menjadi rusak..... Memang kita bergerak sendiri tidak ada yang nuntun..kita mempertahankan lahan pertanian..bukan hanya untuk kita..tetapi untuk anak cucu..kalau kita masuk tambang gimana ? Generasi selanjutnya.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dimaknai bahwa petani akan tercerabut sejak digulirkannya rencana penambangan pasir besi. Rencana tambang pasir besi apabila mulai direalisasikan akan terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi area penambangan pasir. Alih fungsi lahan tersebut menyebabkan petani

tergusur dari lahan miliknya dan tercerabut dari akar leluhurnya. Selain itu indikator keterancaman yang dirasakan petani disebabkan oleh kerja keras dalam mengupayakan lahan yang dulunya tandus menjadi subur tidak akan ada manfaatnya. Hal ini karena kerja keras mengusahakan lahan menjadi produktif bisa hilang karena adanya pertambangan pasir besi. Adanya penambangan pasir besi merupakan ancaman bagi petani yang selama ini sudah mengolah lahan tanah menjadi subur akan menjadi tercemar karena disebabkan aktivitas penambangan pasir besi. Hal ini membuat petani yang sudah mengupayakan lahan menjadi subur tidak akan ada gunanya. Keterancaman pada petani diperkuat oleh temuan bahwa petani tumbuh kekuatiran akan kehilangan lahan yang merupakan titipan bagi anak cucu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa keterancaman kehilangan pekerjaan sebagai petani, tercerabut dari akar budayanya, usaha keras menyuburkan lahan menjadi sia-sia, dan generasi penerus tidak akan bisa memanfaatkan lahan pertanian menjadi indikator utama yang menyebabkan kehidupan petani terancam. Keterancaman ini akan menjadi potensi konflik karena berkaitan nilai, kebanggaan, bersifat kultural, dan menyangkut hajat hidup mencari rezeki. Hal ini senada dengan konsep yang menjelaskan bahwa potensi konflik berkembang apabila nilai berkaitan berhubungan status, prestise, kompetisi, dan adanya perbedaan pandangan dalam mengaplikasikan nilai (Suyono, 2018). Hal ini dibuktikan oleh penelitian keterancaman dapat memberi kontribusi terhadap terjadinya konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang diperjuangkan oleh Boko Haram melawan kekuatan birokrasi karena adanya keterancaman terhadap keberlangsungan kehidupan komunitas tersebut (Ogege, 2013). Teori yang mendasarinya adalah teori frustrasi agresi yang memberi penjelasan lebih jauh keterancaman yang berlangsung lama menyebabkan ketiadaan harapan untuk memperbaiki keadaan, sehingga melahirkan frustrasi. Dalam kondisi frustrasi ini mendorong untuk melakukan tindakan agresi yang diwujudkan melalui perlawanan terhadap otoritas kekuasaan (Akinyetun, 2020).

Adanya temuan penelitian keterancaman menjadi pemicu berkembangnya konflik dapat bermanfaat menjadi sistem peringatan dini untuk menentukan kebijakan penyelesaian konflik. Agar konflik tidak berkembang menjadi manifes maka hal yang harus dilakukan adalah keberanian dan kesediaan dari aparaturnya baik

pihak legislatif maupun eksekutif menerbitkan peraturan sebagai payung hukum untuk mempertahankan lahan pantai menjadi lahan pertanian. Manfaat yang dapat diperoleh dari aturan adalah melindungi petani akan kepemilikan lahan sebagai lahan pertanian. Perlindungan perlu diberikan karena satu-satunya tempat untuk memperoleh rezeki dari lahan tersebut. Sehingga perlindungan terhadap lahan akan menjaga keberlangsungan petani memperoleh pendapatan, menjaga kehidupan kultural petani, memiliki kebanggaan telah memberi kontribusi untuk mempertahankan kelestarian lingkungan, dan dapat memberikan warisan bagi pada generasi berikutnya tetap bisa bercocok tanam di lahan pantai (Suyono 2015).

Atas kebijakan tersebut sebenarnya tidak terlalu berdampak pada korporasi. Hal ini karena sebenarnya perusahaan bisa mencari usaha di bidang lain. Perusahaan tidak melakukan eksploitasi terhadap lahan pantai masih memiliki kemampuan untuk mendirikan bisnis yang berbeda karena memiliki modal yang sangat memadai untuk menggerakkan ekonomi di sektor lain.

Menjaga jarak

Data hasil wawancara dari menjaga jarak dapat ditunjukkan pada bagian berikut :

“Tetapi kalau pertemuan untuk diajak kompromi dengan siapaun yang membantu agar tambang berjalan..jelas kami tidak mau...mau diajak dialog kalau kemauan masyarakat dituruti.. Yang pertama harus kita lihat si a..si b..harus kita cek..latar belakangnya gimana ?berkecimpung dalam bidang apa ? Benar nggak mau bantu kita sebagai petani..atau membawa misi apa..? Tujuan apa ? jadi kita punya jaringan yang bisa untuk melihat itu...Yang orang lain membantu namun tidak merubah prinsip dan melemahkan perjuangan petani.”

Bersumber dari wawancara di atas dapat ditemukan indikator menjaga jarak berkaitan dengan pihak luar boleh membantu tetapi tidak mempengaruhi perjuangan petani. Indikator lain dari menjaga jarak terdapat pada petani tidak mau bekerjasama dengan pihak-pihak yang membantu pihak penambang. Realitas itu menjadikan petani bersedia dibantu oleh orang lain dengan syarat tidak

melemahkan perjuangan petani dalam gerakannya penolakan tambang pasir di wilayahnya.

Hasil penelitian yang menunjukkan menjaga jarak dengan tidak mau bekerja sama dengan pihak penambang, tidak mau berurusan dengan pihak-pihak yang setuju dengan eskplorasi lahan pantai, boleh membantu namun tidak melemahkan perjuangan petani, bersedia berkolaborasi dengan syarat tidak mempengaruhi prinsip-prinsip yang sudah tertanam dalam diri petani, dan masalah yang dialami oleh pihak luar sebagai akibat dari kepeduliannya terhadap perjuangan petani ditanggung sendiri. Hasil penelitian ini merupakan indikator menjaga jarak yang merupakan embrio terjadinya konflik. Secara konseptual dapat dijelaskan bahwa indikator menjaga jarak bisa menjadi potensi konflik karena konflik petani di lahan pantai merupakan konflik yang berada pada kultur Jawa. Pada masyarakat yang berlatar belakang kultur Jawa menunjukkan ada gejala konflik seperti upaya mempertahankan jarak sosial, tumbuh rasa tidak senang yang berdampak pada hambatan untuk bekerja sama dengan pihak luar, tak mau kompromi, tak mau mendengarkan saran orang lain, dan mengucilkan orang-orang yang dianggap tidak sependapat dengan *in group* (Mulder, 1085; Endraswara, 2012).

Sistem peringatan dini yang dapat dilakukan sebagai dasar penanganan tindakan preventif konflik berdasarkan indikator menjaga jarak sosial adalah melakukan pemberdayaan terhadap komunitas petani mengenai manajemen konflik. Pemahaman manajemen konflik yang dimiliki dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan untuk membangun kesadaran bahwa keinginan mencapai tujuan mempenjaga kelestarian lingkungan dapat dipilih dengan cara damai. Cara yang bisa dijalankan adalah mempunyai pengetahuan yang memadai tentang kemampuan strategi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan lahan sebagai lahan pertanian tanpa menggunakan kekerasan (Soliku & Schraml, 2018)

Tujuan ini bisa tercapai bila komunitas petani terampil di dalam mengelola konflik dengan melibatkan berbagai stakeholders yang memberi kontribusi pencapaian tujuan menjaga kelestarian lingkungan di lahan pantai. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut petani perlu menjaga sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun kekuatan gerakan penolakan terhadap eksploitasi sumber daya alam di lahan pantai. Tindakan ini akan menumbuhkan kesadaran tidak menggunakan strategi menjaga jarak dengan berbagai pihak karena memiliki

potensi timbulnya konflik. Sebaliknya petani perlu mempunyai kehendak untuk melibatkan keikutsertaan lebih banyak jejaring sosial untuk mendukung perjuangan petani. Dukungan dari berbagai stakeholder memiliki tekanan lebih besar pada korporasi untuk memenuhi keinginan petani lahan pantai tetap difungsikan sebagai lahan pertanian. Strategi tersebut merupakan upaya damai yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan petani melestarikan lingkungan di lahan pantai (Suyono, 2013; Handayani, dkk. 2018; Widapratama & Darwis, 2019).

Mengarah konflik terbuka

Data hasil wawancara pada faktor mengarah konflik terbuka dapat diperlihatkan pada bagian berikut :

“Yaa..kita..tetap angkat senjata..cangkul..sabit..dan kemarin sudah terbukti..ketika masih menggunakan kekuasaan untuk memaksakan ada tambang di daerah kami..kita lawan juga. Kalau masyarakat sudah mempersiapkan...kalau ada apa2 sudah mempersiapkan..kemarin sudah ada persiapan..kalau dia nekat..kita juga nekat..kalau dia lunak..kita juga lunak.. Yaa, karena aku melihat bahwa pertanian di sini ini bisa menjadi kehidupan yang realyang tidak abal-abal..dan tidak menjadi angan-angan..ini benar-benar kehidupan dan bisa menikmati..bahkan ini adalah ciptaan sendiri, inovasi sendiri, pekerjaan saya sendiri, bisa saya nikmati sendiri...kalau ini merupakan akumulasi dari individu semua orang merasakan seperti..sehingga katakanlah sangat menghargai apa yang mereka lakukan, sehingga mengapa dengan teori apapun..apapun yang dilakukan negara, korporasi, dan kaki tangannya..saya tetap menolak..karena aku merasa ..yaa..menikmati dan enjoy..kehidupan saya seperti ini...siapa pun yang mengganggu..pasti aku lawan....meski taruhannya nyawa.”

Indikator potensi konflik berdasarkan hasil wawancara di atas berkaitan dengan mengarah pada konflik terbuka ditemukan adanya perlawanan dengan berbagai pihak yang mengganggu kehidupan petani dan memiliki keberanian melakukan konflik terbuka untuk mempertahankan lahan sebagai ruang hidup yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Selain itu dapat dijelaskan bahwa bersedia mengorbankan

jiwannya apabila ada pihak-pihak yang memaksakan kehendak pada petani dengan tidak mengizinkan untuk menanam berbagai komoditas sayuran dan buah-buahan di lahan pantai. Petani menanam berbagai komoditas ini juga sebagai wujud nyata untuk menunjukkan perlawanan terhadap berbagai pihak yang menjadi faktor penyebab rusaknya lingkungan. Hal ini menjadikan petani tidak takut pada siapa pun, seperti aparat keamanan dan birokrasi yang lebih berpihak kepada perusahaan penambang dengan cara menghalangi petani bercocok tanam di lahan pantai.

Selanjutnya sebagai realisasi dari sistem peringatan dini apabila suatu eskalasi sudah mengarah pada konflik terbuka perlu dilakukan penanganan agar tidak berkembang menjadi manifes untuk melakukan upaya preventif. Hal tersebut bermanfaat untuk mencegah konflik tidak berujung menjadi kekerasan. Sesuai dengan konsep eskalasi dapat disaksikan dari gejala yang berawal pada situasi yang memperlihatkan adanya perbincangan mengenai isu terhadap masalah yang terjadi. Hal ini ditandai dengan mendiskusikan secara internal, bersifat pasif, menghindari pihak yang dianggap menjadi sumber masalah, dan masih disembunyikan adanya masalah yang terjadi (Sahfutra, 2018; Sahfutra, 2019). Dinamika eskalasi konflik akan meningkat apabila komunitas petani sudah berani menampakkan diri secara terbuka untuk melawan pihak-pihak yang dianggap sebagai sumber masalah. Ketika eskalasi sudah mulai meninggi perlu segera diupaya penyelesaian konflik agar tidak mencapai puncak kekerasan. Penyelesaian konflik dengan melakukan upaya preventif lebih mudah untuk dikerjakan sehingga memberi kesempatan jalan damai di antara pihak yang berkonflik (Mitchell, 2018).

Cara yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif adalah meningkatkan kemampuan *soft skills* petani secara spesifik pada *problem solving* untuk menghadapi masalah terkait dengan konflik lingkungan. Keterampilan yang perlu ditumbuhkan pada petani adalah menemukan strategi pemecahan masalah melalui cara damai. Tindakan menggunakan kekerasan bukan pilihan yang sesuai karena akan berdampak pada kerugian secara ekonomi maupun menimbulkan jatuhnya korban pada petani (Graesser, dkk. 2018).

Modal sosial

Data dari hasil wawancara mengenai modal sosial ditunjukkan pada bagian berikut :

“Tambah pengalaman, pengetahuan, kenalan, tambah saudara...yang dulu tidak kenal menjadi kenal... Di sini karena memang tradisi gotong royong...memang ketika kita mengedepankan kebersamaan sebagai bentuk dari kearifan lokal yang perlu dibudayakan..... Kalau kita sama-sama seperjuangan...karena memiliki kepentingan sama, tekad..sama..mempunyai penderitaan sama.. justru dengan adanya masalah ini kerukunan menjadi kuat....untuk menjaga ini..tetangga yang tak sependapat dikucilkan”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sejak adanya problematika alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi area pertambangan menjadikan petani seperti keluarga besar dan saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sejak adanya gerakan tolak tambang pasir besi petani membentuk paguyuban yang dapat menambah pengetahuan, menjadi saudara, dan saling mengenal antara satu petani dengan petani lain dan ada kedekatan secara emosional sesama petani, karena memiliki kepentingan, perjuangan, dan penderitaan yang sama sebagai dampak kerusakan lingkungan. Modal sosial juga terlihat pada kegotongroyongan meningkat sejak adanya gerakan penolakan tambang pasir besi di wilayahnya. Kegotongroyongan diwujudkan dalam pemberian bantuan modalan sebagai biaya bercocok tanam oleh paguyuban. Setelah ada paguyuban petani lahan pantai sebagai wadah mempertahankan lahan pantai sebagai lahan pertanian tumbuh kerukunan warga untuk saling membantu agar produktivitas komoditas pertanian terus meningkat sehingga kesejahteraan ekonomi menjadi lebih baik.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa kegotongroyongan merupakan tradisi yang sudah tumbuh dengan baik . Tradisi kegotongroyongan merupakan bagian dari kearifan lokal. Bagi petani yang memiliki sikap yang sama akan dibantu oleh petani lain apabila ada kegiatan yang memerlukan bantuan banyak orang. Sebaliknya ada sangsi sosial dan adat apabila petani mengkhianati perjuangan dengan bekerja sama dengan pihak yang setuju eksploitasi lahan panti untuk dimanfaatkan sebagai wilayah pertambangan. Sangsi sosial atau adat yang diberikan adalah pengucilan dari masyarakat, bila ada anggota keluarga yang meninggal tidak bisa dikuburkan di makam desa, tidak menghadiri hajatan, dan bila

terkena musibah tidak dibantu oleh warga lain. Dinamika ini yang dapat menimbulkan keretakan modal sosial. Warga yang diterima dikucilkan dari masyarakat dapat melakukan perlawanan sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Analisis yang dapat dijelaskan dari mendalami kondisi modal sosial yang berada pada suatu komunitas apabila dihadapkan pada masalah yang dihadapi bersama secara *in group*. Seperti hasil penelitian yang dialami oleh komunitas petani saat menghadapi problem lingkungan sebagai akibat rencana eksploitasi sumber daya alam di lahan pantai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial semakin tinggi dengan ditandai adanya kerukunan dan kegotongroyongan yang meningkat sejak komunitas petani dibebani masalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun di sisi lain ada masalah internal yaitu modal sosial yang mulai goyah karena pandangan yang berbeda saat mensikapi masalah lingkungan sebagai dampak dari penambangan di kawasan lahan pantai.

Problem perbedaan pandangan ini membesar akan menyebabkan modal sosial semakin menipis dan mengarah pada eskalasi konflik berpotensi meningkat. Hal ini karena masalah yang terjadi bukan hanya dengan pihak eksternal, tetapi juga pihak internal. Ketika eskalasi konflik mencapai tingkat seperti ini menjadikan berbagai hambatan terjadi saat berusaha untuk menyelesaikan masalah. Pertimbangan tersebut yang menjadikan sistem peringatan dini perlu dilakukan dengan melakukan pemberdayaan pada komunitas petani untuk tetap mempertahankan modal sosial yang sudah ada. Modal sosial perlu dipertahankan karena di dalamnya berisi nilai, norma, kepercayaan, dan jejaring kelembagaan yang dapat dijadikan kekuatan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan di lahan pantai (Ros-Tonen & Derkyi, 2018; Fitriansyah, 2020).

Ketidakpercayaan

Temuan penelitian mengenai ketidakpercayaan ditunjukkan pada wawancara berikut :

“Melihat..gerakan-gerakan di Indonesia yang dicampuri oleh orang luar..tentang penolakan..entah itu LSM, ORMAS, pasti gerakan nggak tahan lama..dan ada yang menumpang... Di sini meskipun dengan teman sendiri tidak percata seratus persen..gitu lho..sama teman sendiri ada

masuk tidak langsung percaya..kita saring..kita cek dulu.. Yaa, itu tadi kalau orang mau solidaritas..kita nggak menutup..tapi kalian punya orang...seperti sampean kalau ingin bersolidaritas dengan kita ...sakit karep mu kowe arep tulung-tulung..ruangan mu di situ.. ..dan kalau ada masalah ditanggung sendiri.... Kalau keadaan seperti ini sebenarnya pemimpin sudah tahu, tapi mengapa mereka diam saja..”

Ketidakpercayaan menjadi bagian dari indikator potensi konflik terlihat pada kewaspadaan terhadap pihak luar yang ingin melemahkan perjuangan gerakan menolak tambang pasir. Hal ini terlihat pada berkembangnya kecurigaan pada pihak tertentu telah memberikan dana pada pihak tertentu yang bertujuan untuk memecah belah kerukunan petani. Adanya kecurigaan ini menjadikan petani tidak mudah percaya dan hati-hati berhubungan dengan pihak luar. Pengalaman itu menjadikan petani memiliki ketidakpercayaan pada pihak lain dengan cara tidak mudah menerima siapa pun yang ingin membantu perjuangan petani. Ketidakpercayaan bukan hanya dengan pihak luar, tetap ditujukan pada pihak internal. Hal ini terlihat pada sesama anggota tidak percaya seratus persen. Anggota perlu saling mengontrol dan mengawasi terhadap anggota lain yang melakukan tindakan mengkhianati perjuangan petani. Ketidakpercayaan juga diberikan kepada pemimpin. Petani menganggap pemimpin tidak bisa dijadikan sandaran terhadap problem yang dihadapinya, karena lebih mendukung keinginan korporasi dengan alasan meningkat pendapatan daerah. Petani tidak percaya dengan argumentasi ini didasarkan pada pertimbangan kegiatan penambangan justru berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat setempat terpukul.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakpercayaan yang ditujukan pada *in group* dan *out group*. Ketidakpercayaan pada *in group* terutama berkaitan dengan adanya kecurigaan pada sebagian anggota telah berkhianat dengan kesediaan untuk bekerja sama dengan korporasi yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Ketidakpercayaan pada faktor eksternal terutama berkaitan dengan pihak luar yang memiliki niat bekerja sama dengan petani bertujuan melemahkan perjuangan menjaga kelestarian lingkungan. Pihak luar bekerja sama sebagai bentuk bujuk rayu agar petani mau melepaskan lahannya yang digunakan sebagai area pertambangan. Ketidakpercayaan yang telah tumbuh

pada petani dengan *in group* dan *out group* perlu dicegah agar tidak berkembang menjadi prasangka. Prasangka perlu dikendalikan agar tidak menjadi faktor penyebab konflik *in group* atau *out group*. Prasangka menjadi pemicu terjadinya konflik karena berisi afek negatif atau ketidaksukaan yang cenderung menimbulkan permusuhan pada pihak lain (Brandt & Crawford, 2020).

Upaya yang dilakukan pada sistem peringatan dini adalah menghilangkan prasangka pada petani (Scarnek, dkk.2019). Langkah menghilangkan prasangka ini menjadi langkah efektif untuk mewujudkan pencegahan didasarkan variabel tersebut memberi pengaruh tinggi pada terjadinya konflik (Suyono, 2015). Cara yang dilakukan untuk menurunkan prasangka dengan hipotesis kontak. Hipotesis kontak merupakan langkah yang efektif untuk menurunkan prasangka karena dapat menemukan pengetahuan baru terhadap pihak-pihak lain. Pengetahuan baru ini berguna untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan atribusi, yaitu berupa atribusi internal terhadap *in group* dan atribusi eksternal terhadap *out group* sehingga tercipta sikap positif dan bersedia menjalin komunikasi interpersonal dengan anggota kelompok sendiri maupun kelompok lain untuk menyelesaikan konflik secara damai (Kotzur, dkk. 2019; Zhou, dkk. 2019).

KESIMPULAN

Sistem peringatan dini dapat dijadikan metode untuk mencegah konflik agar tidak berkembang menjadi manifes. Metode yang dilakukan untuk menemukan sistem peringatan dini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasilnya berupa indikator potensi konflik seperti keterancaman, menjaga jarak, mengarah konflik terbuka, modal sosial, dan ketidakpercayaan. Setelah memperoleh indikator potensi konflik dibuat rekomendasi sebagai dasar melakukan upaya preventif konflik. Rekomendasi ini bermanfaat sebagai informasi untuk membuat kebijakan penanganan konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan dan berujung pada perdamaian.

Keterbatasan dalam kajian ini masih menggunakan satu metode sehingga hasilnya belum komprehensif untuk menggambarkan sistem peringatan dini sebagai upaya pencegahan konflik untuk melestarikan lingkungan di lahan pantai. Saran yang diberikan atas keterbatasan ini adalah sistem peringatan dini yang dilakukan menggunakan berbagai metode. Selain metode kualitatif dapat menggunakan

metode kuantitatif dengan menemukan model potensi konflik secara teoritik dibangun dari berbagai prediktor konflik. Setelah berhasil membangun model potensi konflik, proses berikutnya adalah menemukan indeks konflik lingkungan. Bersumber dari indeks konflik lingkungan ini dapat dihasilkan tingkat konflik berada pada tingkat rendah, sedang, atau tinggi. Indeks bermanfaat menjadi acuan sistem peringatan dini untuk penanganan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, I. H., & Sumktaki, P. (2020). Analisis dampak penambangan pasir pantai terhadap kerusakan lingkungan fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(4), 887-895. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4310457>
- Ade Lestari, S., Zulkarnain, I., & Febriani, L. (2021). Strategi penanganan konflik dengan inovasi sosial (Studi pada konflik perebutan lahan di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur). *Jurnal Studi Inovasi*, 1(3), 45-54. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.28>
- Akinyetun, T. S. (2020). A theoretical assessment of Boko Haram insurgency in Nigeria from relative deprivation and frustration-aggression perspectives. *African Journal of Terrorism and Insurgency Research*, 1(2), 87-109. <https://doi.org/10.31920/2732-5008/2020/v1n2a5>
- Boxer, D., & Radice, J. (2018). Bickering: A conflict speech behavior of close social distance. *Journal of Language Aggression and Conflict*, 6(2), 177-202. <https://doi.org/10.1075/jlac.00009.box>
- Brandt, M. J., & Crawford, J. T. (2020). Worldview conflict and prejudice. In *Advances in experimental social psychology*, 61, 1-66. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2019.09.002>
- Brecke, P. (2000). *Risk assessment models and early warning systems* (No. P 00-302). WZB Discussion Paper. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/49859/1/311373569.pdf>
- Celestina, M. (2018). Between trust and distrust in research with participants in conflict context. *International Journal of Social Research Methodology*, 21(3), 373-383. <https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1427603>

- Chang, M. L. (2020). Can intergroup conflict aid the growth of within-and between-group social capital?. *Journal of Management & Organization*, 26(1), 52-74. <https://doi.org/10.1017/jmo.2017.51>
- Czarnek, G., Szwed, P., & Kossowska, M. (2019). Right-and left-wing prejudice toward dissimilar groups in cultural and economic domains. *European Journal of Social Psychology*, 49(4), 807-823. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2548>
- Endraswara, S. 2012. *Falsafah Hidup Jawa. Menggali mutiara kebijakan dari intisari filsafat kejawen*. Cakrawala.
- Fitriansyah, F. (2020). Kajian kebijakan modal sosial dalam menyelesaikan konflik tambang pada masyarakat pesisir. *Reformasi*, 10(2), 236-249. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1956>
- Frauenberger, C., Good, J., & Keay-Bright, W. (2010, November). Phenomenology, a framework for participatory design. In *Proceedings of the 11th Biennial Participatory Design Conference* (pp. 187-190). <https://doi.org/10.1145/1900441.1900474>
- Gerring, J. (2017). Qualitative methods. *Annual Review of Political Science*, 20, 15-36. <https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-polisci-092415-024158>
- Graesser, A. C., Fiore, S. M., Greiff, S., Andrews-Todd, J., Foltz, P. W., & Hesse, F. W. (2018). Advancing the science of collaborative problem solving. *Psychological Science in the Public Interest*, 19(2), 59-92. <https://doi.org/10.1177/1529100618808244>
- Hadar-Shoval, D., Alon-Tirosh, M., & Morag, H. (2019). Social relations between students from two groups in conflict: Differences in stereotypes and perceived social distance between Jewish and Arab nursing students. *Nurse education today*, 78, 5-9. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.04.001>
- Handayani, L., Mahdalena, V., & Khalil, M. (2018). Perubahan sosial dan manajemen konflik di Desa Cikarawang Bogor. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 22(2), 123-134. <http://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/view/90>
- Harel-Fisch, Y., Radwan, Q., Walsh, S. D., Laufer, A., Amitai, G., Fogel-Grinvald, H., & Abdeen, Z. (2010). Psychosocial outcomes related to subjective threat from armed conflict events (STACE): Findings from the Israeli-Palestinian

- cross-cultural HBSC study. *Child abuse & neglect*, 34(9), 623-638.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.12.007>
- Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan konflik sumber daya alam terbarukan di perbatasan dalam pendekatan ekologi politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 144-151.
<https://jurnal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/4981/4110>
- Hussein, A. (2009). The use of triangulation in social sciences research. *Journal of comparative social work*, 4(1), 106-117. <https://doi.org/10.31265/jcsw.v4i1.48>
- Isabrin, F. (2013). Dampak rencana penambangan pasir besi terhadap kondisi sosial petani lahan pantai di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 11(1).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/article/view/3570>
- Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of advanced nursing*, 72(12), 2954-2965.
<https://doi.org/10.1111/jan.13031>
- Kotzur, P. F., Schäfer, S. J., & Wagner, U. (2019). Meeting a nice asylum seeker: Intergroup contact changes stereotype content perceptions and associated emotional prejudices, and encourages solidarity-based collective action intentions. *British Journal of Social Psychology*, 58(3), 668-690. <https://doi.org/10.1111/bjso.12304>
- Lesmana, D. S., Yunas, A. P. R., Permana, N. S., & Utami, W. K. (2020). Konflik pembangunan peternakan ayam di Kecamatan Gunung Kencana. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 8(1).
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agresi/article/view/3061/1950>
- Malik, I & Muluk, H. 2009. *Peace psychology of grassroots reconciliation: Lesson learned from the "Baku Bae" peace movement*. Springer
- Malik, I. (2013). Strategi pecegahan konflik. *Paper, tidak diterbitkan*. Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- McDougall, C., & Banjade, M. R. (2015). Social capital, conflict, and adaptive collaborative governance: exploring the dialectic. *Ecology and Society*, 20(1).
<https://www.jstor.org/stable/pdf/26269739.pdf?refreqid=excelsior%3A27ad9444ed058c1fee0365d609dfa78c>

- Mitchell, C. (2018). The anatomy of de-escalation. In *Conflict resolution: Dynamics, process and structure* (pp. 37-58). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429444142>
- Mulder, N. (1985). *Pribadi dan masyarakat di Jawa*. Penerbit Sinar Harapan
- Munawwaroh, T., Zuhdi, S., & Wahyudi, B. (2018). Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik tambang emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. *Damai dan Resolusi Konflik*, 4(1), 45-72. <http://139.255.245.7/index.php/DRK/article/view/205/pdf>
- Novita, A. A. (2018). Collaborative governance dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 27-35. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/751/1300>
- Ogege, S. O. (2013). Insecurity and sustainable development: The Boko Haram debacle in Nigeria. *American International Journal of Social Science*, 2(7), 82-88. http://www.aijssnet.com/journals/Vol_2_No_7_October_2013/10.pdf
- Pitlik, H., & Rode, M. (2020). Radical distrust: are economic policy attitudes tempered by social trust?. *Social Indicators Research*, 1-22. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02317-8>
- Ramadhan, D. T., Budimanta, A., & Soelarno, S. W. (2016). Resolusi konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(2), 92-104. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/10535/8379>
- Ros-Tonen, M. A., & Derkyi, M. (2018). Conflict or cooperation? Social capital as a power resource and conflict mitigation strategy in timber operations in Ghana's off-reserve forest areas. *Ecology and Society*, 23(3). <https://www.jstor.org/stable/pdf/26799162.pdf?refreqid=excelsior%3Ad2e3ea699c4b15cd09f4f18cceddafa16>
- Sahfutra, S. A. (2018). Konstruksi Konflik dan bina-damai dalam keberagaman masyarakat Jawa. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 2(1), 28-43. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/659>
- Sahfutra, S. A. (2019). Konflik dan bina damai masyarakat multireligius: Studi masyarakat Turgo Lereng Merapi Yogyakarta. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 2(2), 71-97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3540507>

- Schmid, K., & Muldoon, O. T. (2015). Perceived threat, social identification, and psychological well-being: The effects of political conflict exposure. *Political Psychology*, 36(1), 75-92. <https://doi.org/10.1111/pops.12073>
- Sjafri, J. (2011). Pasir besi kulon progo: Kondisi dan situasi penambangan lahan pasir besi Kabupaten Kulon Progo. *Laporan Penelitian, tidak diterbitkan*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY.
- Soliku, O., & Schraml, U. (2018). Making sense of protected area conflicts and management approaches: A review of causes, contexts and conflict management strategies. *Biological Conservation*, 222, 136-145. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.04.011>
- Sørensen, M. J., & Johansen, J. (2016). Nonviolent conflict escalation. *Conflict Resolution Quarterly*, 34(1), 83-108. <https://doi.org/10.1002/crq.21173>
- Stemler, S. (2000). An overview of content analysis. *Practical assessment, research, and evaluation*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.7275/z6fm-2e34>
- Suyono, H. (2013). Studi kualitatif menemukan konflik lahan pantai kulon progo. *Laporan Penelitian*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Suyono, H. (2015). Pengembangan model dan indeks deteksi dini konflik dengan prediktor identitas sosial, prasangka, dan intensi. *Disertasi*. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Suyono, H. (2018). *Merawat perdamaian metode sistem peringatan dini konflik*. Semesta Ilmu dan Clinic for Community Empowerment.
- Tiruneh, B. T. (2010). Establishing an early warning system in the African peace and security architecture: Challenges and prospects. <https://media.africaportal.org/documents/Occasional-Paper-29-Birikit.pdf>
- Zhou, S., Page-Gould, E., Aron, A., Moyer, A., & Hewstone, M. (2019). The extended contact hypothesis: A meta-analysis on 20 years of research. *Personality and Social Psychology Review*, 23(2), 132-160. <https://doi.org/10.1177/1088868318762647>
- Widapratama, F. R., & Darwis, R. S. (2019). Penerapan manajemen konflik dalam penyelesaian sengketa lahan antara petanii dengan korporasi properti di Kabupaten Karawang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 28-36. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/20890/9918>

Wulf, H., & Debiel, T. (2009). Conflict early warning and response mechanisms: Tools for enhancing the effectiveness of regional organisations? A comparative study of the AU, ECOWAS, IGAD, ASEAN/ARF and PIF. <http://eprints.lse.ac.uk/28495/1/WP49.2.pdf>.